

EFEKTIVITAS PROSES PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC (SIAKBA)

Isma Kusmiati¹, Irma Purnamasari², Euis Salbiah³

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Djuanda Bogor. Jl. Tol Ciawi No. 1 Kode Pos 16720
e-mail: ismakusmiati751@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan yang berbasis digital melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Kemampuan pengguna dalam mengaplikasikan SIAKBA menjadi tolak ukur penilaian untuk melihat keberhasilan SIAKBA dalam membantu proses pendaftaran. Kualitas informasi yang disampaikan sistem menjadi acuan frekuensi penggunaan sistem. Tujuan Penelitian ini untuk menilai efektivitas penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dengan menggunakan model efektivitas sistem Delone & McLean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAKBA dinilai baik dalam membantu proses pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK), namun perlu untuk dioptimalisasikan seperti dalam segi sistem dan informasi guna menambah kebermanfaatannya bagi pengguna, serta meringkas tahapan pada seleksi administrasi agar tidak dilakukan verifikasi berkas ganda secara *online* melalui SIAKBA dan *offline* ke kantor KPU. Hambatan yang terjadi yaitu lamanya akses SIAKBA, terbatasnya informasi yang informatif, dan kurangnya kemampuan pengguna dalam mengaplikasikan SIAKBA. Upaya yang disarankan yaitu dengan dilakukannya pemeliharaan server secara berkala, memperluas cakupan informasi yang disediakan, dan melakukan sosialisasi secara masif dan menyediakan fitur FAQ (*frequently Asked Question*) sebagai alternatif jawaban dari permasalahan.

Kata kunci: Pemilihan Umum, SIAKBA, Panitia Pemilihan Kecamatan

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pemilihan umum, serta untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata

kelola pemerintahan komisi pemilihan umum (KPU) mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu KPU meluncurkan 8 (delapan) aplikasi digital dalam menunjang penyelenggaraan pemilu di tahun 2024, dan SIAKBA merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan untuk membantu pendaftaran Badan Adhoc.

Tujuan digitalisasi yang dilakukan oleh KPU adalah untuk mencapai kecepatan dan ketepatan waktu, kemudahan, efisien, transparansi, serta keterbukaan informasi publik. SIAKBA mulai diluncurkan pada 20 Oktober 2022, untuk mengaksesnya dapat melalui web <https://siakba.kpu.go.id/>. Sebagai sistem informasi *online* yang digunakan untuk rekrutmen anggota KPU dan Badan Adhoc (PPK/PPS), SIAKBA dapat diakses oleh para pendaftar untuk melakukan pendaftaran secara *online*. Mulai dari pembuatan akun, mengisi daftar riwayat hidup/biodata dan mengunggah dokumen persyaratan.

Dalam pemilu tahun 2024, Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Provinsi Jawa Barat dengan total 3.889.441 orang pemilih (databoks.katadata.co.id), Sehingga memiliki beban penyelenggaraan pemilu tertinggi dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 15.228 yang berada di 40 Kecamatan, dan di 435 Desa/Kelurahan.

Besarnya beban penyelenggaraan tentu menjadi tantangan yang cukup besar bagi KPU Kabupaten Bogor untuk terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Dengan demikian, maka diperlukan tenaga pendukung yang kompeten. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang berada di tingkat kecamatan, yang bertugas untuk membantu dan mendukung KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu seleksi yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan calon-calon yang kompeten, memiliki kepribadian dengan jiwa pelayanan yang tinggi, serta berintegritas.

Tabel 1.1
Rekapitulasi pendaftar calon anggota PPK

Tahapan	Jumlah	Lulus
Pendaftaran	1.915 Orang	-
Seleksi Berkas Administrasi	1.915 Orang	946 Orang
Seleksi CAT (<i>Computer Assisted Test</i>)	946 Orang	587 Orang
Seleksi Wawancara	587 Orang	398 Orang
Penetapan Anggota PPK	398 Orang	200 Orang Anggota PPK
		198 Orang Penggantian Antar Waktu (PAW)

Sumber: Instagram *kpukab.bogor*

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 1.915 orang pendaftar calon anggota PPK yang masuk ke Kantor KPU Kabupaten Bogor. Dari setiap kecamatan anggota PPK berjumlah 5 orang yang terdiri dari Ketua, Penanggung Jawab Teknis, Penanggung Jawab Data Dan Informasi (PJ Datin), Penanggung Jawab Sumber Daya Manusia (PJ SDM), dan Penanggung Jawab Sosialisai Dan Partisipasi Masyarakat (PJ Sosparmas). Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan sehingga dari jumlah tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor harus merekrut 200 orang Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dengan adanya SIAKBA para calon anggota PPK diharuskan melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* SIAKBA. Namun, dalam pengimplementasiannya banyak pendaftar PPK yang belum paham terkait pendaftaran melalui SIAKBA, sehingga para pendaftar banyak melakukannya secara langsung di Kantor KPU. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Staff Hukum dan SDM selaku operator SIAKBA KPU Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa pendaftar yang melalui SIAKBA dan yang langsung ke kantor KPU jumlahnya hampir berimbang.

Pendaftaran secara *offline* pun masih diperkenankan karena untuk menjangkau semua kalangan juga sudah menjadi tanggung jawab pihak KPU akan membantu peserta untuk mendaftar melalui SIAKBA. Namun, hal tersebut dinilai kurang efektif bagi pihak penyedia pelayanan (KPU), melihat banyaknya pendaftar sehingga

verifikasi berkas secara manual akan memakan waktu lebih lama, sedangkan waktu untuk pembentukan PPK sangat terbatas.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan *aksesibilitas* ke website SIAKBA yang terkadang sulit diakses oleh para calon pendaftar PPK. SIAKBA diimplementasikan di seluruh Indonesia, indikasi awal hal tersebut terjadi karena banyaknya yang mengakses SIAKBA dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut membuat kekhawatiran calon pendaftar dan mengakibatkan meningkatnya aduan dan permintaan bantuan melalui *helpdesk* KPU.

Disisi lain, permasalahannya yaitu lambatnya informasi yang disampaikan melalui SIAKBA, kurang menariknya format informasi dalam tampilan *website* SIAKBA, terbatasnya informasi yang disajikan SIAKBA sehingga SIAKBA tidak cukup informatif bagi pengguna, serta tidak adanya pemberitahuan melalui *email* secara personal kepada peserta yang lolos padahal SIAKBA sudah tersinkronisasi dengan *email*. Hal ini menyebabkan beberapa calon pendaftar tertinggal untuk melaksanakan tahap seleksi selanjutnya, dalam permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh faktor *internal* pula (Pribadi Pendaftar) karena kurang *update* nya pendaftar, serta intensitas penggunaan media sosial pendaftar. Namun, dengan adanya sistem informasi yang sudah sinkron dengan *email* diharapkan mampu memberikan peranan lebih di dalam sistem.

Kemudian Wulandari *et al.*, (2023) dalam penelitiannya mengenai implementasi SIAKBA dinilai dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik namun perlu untuk dioptimalkan, hal ini didasari karena beberapa pihak/masyarakat yang belum bisa untuk menggunakannya. Amin *et al.*, (2023) dalam bimtek pembentukan Badan Adhoc menyatakan diperlukan pemahaman mendalam terkait tata cara kerja SIAKBA, ditambah dengan pengelolaan data dan sistem informasi KPU yang dianggap belum dapat memfasilitasi secara komprehensif. Mengingat SIAKBA merupakan sistem

informasi yang baru diluncurkan tentunya akan meninggalkan kekhawatiran dalam pengaplikasiannya pada proses rekrutmen.

Sebagai inovasi dari KPU untuk membantu proses rekrutmen Badan Adhoc, SIAKBA diharapkan mempermudah publik dalam mengakses peluang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Namun dengan adanya permasalahan yang terjadi menambah kekhawatiran dalam efektivitas penggunaannya, dapatkah SIAKBA menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk mengetahui hasilnya penulis tertarik untuk menguji efektivitas SIAKBA dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan upaya penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian berupa angka-angka yang di analisis secara statistik (Sugiyono, 2010:13). Kemudian di dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui nilai variabelnya.

Populasi dalam penelitian ini terdapat 200 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kabupaten Bogor yang melaku pendaftaran melalui SIAKBA. Kemudian untuk mendapatkan sampel penelitian ditentukan dengan teknik *cluster sampling* sehingga didapatkan 30 responden yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektifitas sistem informasi yang dikemukakan Delone & McLean yang terdiri dari enam indikator yaitu, 1) kualitas sistem, 2) kualitas informasi, 3) penggunaan, 4) kepuasan pengguna, 5) pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan pengguna, dan 6) pengaruhnya terhadap kinerja organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang diukur melalui model efektifitas Delone & McLean yang terdiri dari 6 dimensi didapatkan hasil, sebagai berikut:

1. Dimensi Kualitas Sistem

Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Dimensi Kualitas Sistem

Dimensi	Indikator	Mean	Kategori
Kualitas Sistem	Kemudahan Penggunaan	4,5	Sangat Baik
	Kecepatan Akses	4,1	Baik
	Keandalan Sistem	4,02	Baik
	Keamanan	4,17	Baik
Rata-rata		4,20	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil rekapitulasi dimensi kualitas sistem didapatkan nilai rata-rata 4,20 yang berarti “Baik”. Hasil penilaian tersebut baik namun belum optimal. Indikator dengan penilaian terendah yaitu keandalan sistem dengan nilai rata-rata 4,02 termasuk kedalam kategori “Baik”. Keandalan sistem berkaitan dengan kualitas koneksi server dan kestabilan sistem dari kerusakan. Lambatnya akses untuk masuk kedalam SIAKBA menunjukkan bahwa server tidak mampu merespon dengan cepat, dan server tidak kuat menampung banyaknya pengakses, sehingga sistem tidak dapat dikatakan stabil karena sering bermasalah.

2. Dimensi Kualitas Informasi

Tabel 1.3
Rekapitulasi hasil Dimensi Kualitas Informasi

Dimensi	Indikator	Mean	Kategori
Kualitas Informasi	Kelengkapan	3,87	Baik
	Relevan	4,03	Baik
	Akurat	4,13	Baik
	Ketepatan waktu	4	Baik
	Format/tampilan	3,9	Baik
Rata-rata		3,98	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil Rekapitulasi dimensi kualitas informasi didapatkan nilai dengan rata-rata 3,98 termasuk kedalam kategori penilaian “Baik”. Dari kelima indikator yang menjadi penilaian dimensi kualitas informasi mendapatkan hasil penilaian yang baik, hasil penilaian tersebut dapat dikatakan belum optimal. Indikator dengan nilai terendah adalah indikator kelengkapan informasi yang mendapatkan nilai dengan rata-rata 3,87 yang berarti “Baik”. Penilaian tersebut menyatakan bahwa informasi di dalam SIAKBA kurang lengkap, karena informasi didalamnya terbatas pada jadwal tahapan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna pada saat pendaftaran PPK.

3. Dimensi Penggunaan

Tabel 1.4
Rekapitulasi Hasil Dimensi Pengguna

Dimensi	Indikator	Rata-Rata	Kriteria Penafsiran
Dimensi Penggunaan	Kemampuan Pengguna	4,43	Sangat Baik
	Frekuensi Penggunaan	3,93	Baik
	Pengalaman Pengguna	4,26	Sangat Baik
Rata-Rata		4,21	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil rekapitulasi indikator frekuensi penggunaan mendapatkan nilai rata-rata 4,21 yang berarti “Sangat Baik”. Namun, terdapat kategori yang belum optimal yaitu frekuensi penggunaan SIAKBA dalam menjadikan SIAKBA sebagai sumber informasi utama mendapatkan nilai rata-rata 3,93 yang berarti “Baik”. Hal tersebut didasari karena kecenderungan responden untuk mengakses informasi lebih sering mengaksesnya melalui *website* dan juga Instagram resmi KPU, karena responden menilai informasi yang disajikan dalam SIAKBA tidak cukup lengkap dan *update* informasinya yang lambat.

4. Dimensi kepuasan Pengguna

Tabel 1.5
Rekapitulasi Hasil Dimensi Kepuasan Pengguna

Dimensi	Indikator	Mean	Kategori
Kepuasan Pengguna	Efisien	4,27	Sangat Baik
	Efektif	4,2	Baik
	Kepuasan	4,1	Baik

	Kebanggaan	4,23	Sangat Baik
Rata-rata		4,20	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil rekapitulasi dimensi kepuasan pengguna mendapatkan nilai dengan rata-rata 4,20 termasuk kedalam kategori “Baik”. terdapat indikator dengan nilai rata-rata terendah yaitu indikator kepuasan dengan nilai rata-rata 4,1 termasuk dalam kategori “Baik”. Kepuasan responden dengan fitur dan informasi dalam SIAKBA sudah baik, namun belum optimal, responden merasa bahwa penggunaan SIAKBA menambah tahapan seleksi administrasi yaitu berkas administrasi yang harus dikumpulkan secara ganda, melalui *online* dan *offline* ke kantor KPU.

5. Dimensi Dampak Individual

Tabel 1.6
Rekapitulasi Hasil Dimensi Dampak Individual

Dimensi	Indikator	Rata-rata	Kriteria Penafsiran
Dampak Individual	Mempermudah pendaftaran	4,2	Baik
	Mengehemat pengeluaran individu	4,27	Sangat Baik
	Rata-rata	4,24	Sangat Baik

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan rekapitulasi dimensi dampak individual menunjukkan hasil persepsi pengguna terhadap penggunaan SIAKBA dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan mendapatkan nilai rata-rata 4,24 yang berarti “Sangat Baik”. Hal tersebut dinilai dari persepsi responden mengenai pernyataan bahwa SIAKBA mudah untuk digunakan, dan menghemat dana para calon pendaftar anggota PPK.

6. Dimensi Dampak Organisasi

Tabel 1.7
Rekapitulasi hasil Dimensi Dampak Organisasi

Dimensi	Indikator	Rata-rata	Kriteria Penafsiran
Dampak Organisasi	Produktivitas	4,37	Sangat Baik
	Proses Seleksi	4,23	Sangat Baik
	Transparansi	4	Baik

	Efisiensi Anggaran	4,23	Sangat Baik
	Rata-rata	4,21	Sangat Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan rekapitulasi dari persepsi responden terhadap pengaruh penggunaan SIAKBA dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilihat dari 4 pernyataan yaitu berpengaruh pada peningkatan produktivitas KPU, mempercepat proses seleksi, transparansi hasil seleksi, dan efisiensi anggaran KPU. Hasil nilai rata-rata menunjukkan 4,21 yang berarti “Sangat Baik”. Namun terdapat satu pernyataan yang belum optimal yaitu mengenai transparansi hasil seleksi dengan nilai rata-rata 4 yang berarti “Baik”.

Tabel 1.8

Rekapitulasi Variabel Efektivitas Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam Rekrutmen Badan Adhoc Kpu Kabupaten Bogor

Dimensi	Indikator	Skor Nilai	Kategori
Kualitas Sistem	Kemudahan Penggunaan	4,5	Sangat Baik
	Kecepatan Akses	4,1	Baik
	Keandalan Sistem	4,02	Baik
	Keamanan	4,17	Baik
Rata-rata		4,20	Baik
Kualitas Informasi	Kelengkapan	3,87	Baik
	Relevan	4,03	Baik
	Akurat	4,13	Baik
	Ketepatan waktu	4	Baik
	Format/tampilan	3,9	Baik
Rata-rata		3,98	Baik
Pengguna	Kemampuan Pengguna	4,43	Sangat Baik
	Frekuensi penggunaan	3,93	Baik
	Pengalaman Pengguna	4,26	Sangat Baik
Rata-rata		4,21	Sangat Baik
Kepuasan Pengguna	Efisien	4,27	Sangat Baik
	Efektif	4,2	Baik
	Kepuasan	4,1	Baik
	Kebanggaan	4,23	Sangat Baik
Rata-rata		4,2	Baik
Dampak Individual	Mempermudah	4,2	Baik
	Menghemat	4,27	Sangat Baik

Rata-rata		4,23	Sangat Baik
Dampak Organisasi	Produktivitas	4,37	Sangat Baik
	Proses Seleksi	4,23	Sangat Baik
	Transparansi	4	Baik
	Efisiensi Anggaran	4,23	Sangat Baik
Rata-rata		4,21	Sangat Baik
Total Rata-rata		4,17	Baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari ke-6 dimensi SIAKBA menggunakan teori efektivitas sistem informasi yang dikemukakan oleh Delon & MCLean menunjukkan nilai rata-rata 4,17 yang berarti "Baik". Hasil penilaian tersebut sudah baik namun belum optimal. Pada dimensi kualitas sistem indikator yang belum optimal terdapat pada kecepatan akses sistem, keandalan sistem, dan keamanannya. Pada dimensi kualitas informasi SIAKBA dinilai belum optimal dalam menyajikan kelengkapan informasi, informasi yang relevan sesuai kebutuhan, keakuratan informasi, tepat waktu, dan tampilan website nya belum didesain secara optimal. Pada dimensi penggunaan terdapat pada frekuensi penggunaan yang belum optimal. Pada dimensi kepuasan pengguna, menunjukkan responden tidak signifikan merasakan kepuasan dalam menggunakan SIAKBA. Kemudian pada dimensi dampak individual dan organisasi indikator yang belum optimal terdapat pada indikator mempermudah dan transparansi.

Hambatan dalam mengaplikasikan SIAKBA pada rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Hambatan yang dihadapi adalah lamanya akses untuk masuk ke SIAKBA. Hambatan tersebut terjadi karena banyaknya para calon pendaftar PPK yang mengakses *website* dalam waktu bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk ke *website* SIAKBA.
2. Terbatasnya informasi yang disajikan SIAKBA menjadikan informasi yang disampaikan kurang menarik dan tidak cukup informatif bagi para calon

pendaftar. Serta lambatnya informasi yang di sampaikan SIAKBA, sehingga pengguna lebih memilih mengakses informasi dari sumber lain.

3. Kurangnya kemampuan para pendaftar dalam mengaplikasikan SIAKBA, sehingga para calon mendaftar tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, dan menyebabkan tingginya angka permintaan bantuan ke kantor KPU.

Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi ketika rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan

1. SIAKBA digunakan diseluruh wilayah di Indonesia, maka dibutuhkan pemeliharaan sistem secara berkala untuk menghindari kemungkinan permasalahan yang terjadi, agar sistem dapat menampung semua pengakses yang akan mendaftar dan dapat merespon permintaan pengguna dengan cepat. Disisi lain, pengguna dapat melakukan melaporkan kendala kepada pihak KPU agar dapat segera ditangani. Pihak KPU pun harus responsif terhadap pengaduan yang masuk dan harus segera menindaklanjuti dengan melaporkannya langsung ke KPU Provinsi.
2. Memuat informasi yang lengkap dengan memperluas cakupan informasi yang akan disediakan di dalam SIAKBA, serta disertai visual yang menarik berupa gambar sehingga SIAKBA dapat menjadi sistem informasi satu akses yang sangat informatif bagi pengguna dan tidak merepotkan pengguna untuk memvalidasi data yang di lihat dari sumber lain nantinya. Menyediakan penyampaian informasi secara *real time*, dan terintegrasi dengan *email* sehingga pengguna akan dapat melihat hasil notifikasi pengumumannya secara langsung.
3. Menyediakan menu FAQ (*frequently Asked Question*) dari permasalahan yang sering terjadi, sehingga jika ada pengguna dengan permasalahan yang sama mereka dapat mencari cara penyelesaiannya didalam sistem, serta memaksimalkan penggunaan media sosial dalam memberikan informasi dan sosialisasi dengan masif mengenai pendaftaran, tahapan, jadwal, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas penggunaan SIAKBA di KPU Kabupaten Bogor pada pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dinilai baik. Dapat dibuktikan dengan hasil jawaban responden pada ke 6 (enam) dimensi yaitu mendapatkan nilai dengan rata-rata 4,17 yang bermakna "Baik". Penilaian tersebut menunjukkan bahwa SIAKBA dapat membantu di dalam proses pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) baik kepada pengguna maupun kepada instansi. Namun, perlu untuk dioptimalisasi agar peran SIAKBA dalam membantu proses rekrutmen dapat berjalan secara maksimal seperti dalam pemeliharaan dan pengawasan sistem agar sistem stabil terhindar dari kerusakan, melengkapi informasi yang disajikan sehingga dapat menjadi pusat informasi dalam satu kali akses, serta dalam memperingkas tahapan pendaftaran administrasi sehingga para calon pendaftar tidak perlu lagi melakukan pengumpulan berkas untuk verifikasi data secara fisik ke kantor KPU, karena berkas yang di *upload* dan diserahkan secara fisik merupakan berkas data yang sama,
2. Hambatan yang terjadi dalam pengaplikasian SIAKBA yaitu lamanya akses untuk masuk ke SIAKBA disebabkan karena banyaknya para calon pendaftar PPK yang mengakses *website* dalam waktu bersamaan. Lambat dan terbatasnya informasi yang disajikan SIAKBA sehingga tidak cukup informatif bagi para calon pendaftar. Serta kurangnya kemampuan para pendaftar dalam mengaplikasikan SIAKBA.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani hambatan yaitu dilakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan melibatkan semua kalangan dalam pemantauan, menyajikan informasi yang informatif bagi pengguna dengan menarik, mudah dipahami dan tepat waktu, menyediakan menu FAQ (*frequently Asked Question*) dari permasalahan yang sering terjadi, sehingga memudahkan

pengguna untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang pernah/sering dialami.

REFERENSI

- Agung, N. (2022). *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia : Digitalisasi Pemilu di Indonesia Kebijakan & Implementasi*.
- Amin, M., Ihsan, R. N., Mahmudah, Laelannur, & Ramadhan, F. (2023). Bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc melalui aplikasi SIAKBA oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 832–839.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Iivari, J. (2005). An Empirical Test of the DeLone-McLean Model of Information System Success. *Data Base for Advances in Information Systems*, 36(2), 8–27. <https://doi.org/10.1145/1066149.1066152>
- Khan, S., Muradi, & Akbar, I. (2022). Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi di Kabupaten Banggai). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 1–10.
- Muhamad, N. (2023). 10 Wilayah Jawa Barat Dengan Pemilih Terbanyak Dalam Pemilu 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/12/10-wilayah-jawa-barat-dengan-pemilih-terbanyak-dalam-pemilu-2024>. Diakses 20 Oktober 2023.
- Rahayu, S. D., & Rohmah, N. S. (2024). Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya. *Jurnal.Dpr.Go.Id*, 27(2), 183–193.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wulandari, M. S., Yuwanto, & Herawati, N. R. (2023). Implementation of the SIAKBA Application Sub-District Election Committee Admission Committee at the Semarang. *Perspektif*, 12(2), 471–478. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8886>

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Waki Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Waki Walikota.